

PEMILIHAN PERANGKAT RETORIKA PADA PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMPROMOSIKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Noermanzah
Univesitas Bengkulu
noermanzah@unib.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pemilihan perangkat retorika pada pidato presiden Republik Indonesia dalam mempromosikan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Metode penelitian menggunakan analisis wacana kritis model Van Dijk. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan catatan. Teknik analisis pada tiga kerangka dimensi yaitu pada teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Uji keabsahan data menggunakan uji validitas pakar dan triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo dalam menggunakan perangkat retorika, baik dalam bentuk kalimat, diksi, kohesi, dan koherensi bukan hanya memberikan janji saja pada masyarakat dalam setiap bahasa yang disampaikan dalam pidatonya, tetapi benar-benar dilaksanakan khususnya pada program pendidikan. Walaupun ada beberapa program pendidikan yang menjadi janji dan harapan di masa yang akan datang, tetapi sebagian besar dilaksanakan pada masa kerjanya. Perlu diketahui bahwa perangkat retorika yang disusun pada pidato resmi di bidang pendidikan disusun oleh tim kerja kepresidenan. Berbeda dengan pidato tidak resmi lebih dominan disusun oleh presiden secara pribadi sehingga terlihat pidato yang disampaikan masih ada yang menggunakan kalimat minor dan mayor, diksi slang, diksi konotasi, diksi jargon, idiom, dan kohesi elipsis yang seharusnya dihindari dalam penggunaan pidato kenegaraan presiden Republik Indonesia.

Kata kunci: perangkat retorika, pidato presiden, kebijakan pemerintah, bidang pendidikan

Abstract

The objective of this research was to explain the selection of rhetorical instruments in the speech of the President of the Republic of Indonesia in promoting government policies in education. The research method used is Van Dijk model of critical discourse analysis. Data collection techniques using documentation techniques, interviews, and notes. The analysis technique is based on three dimensional frameworks, namely the text, social cognition, and social context. The data validity test used expert validity test and data source triangulation. The results show that specifically President Susilo Bambang Yudhoyono and President Joko Widodo in using rhetorical tools, both in the form of sentences, diction, cohesion, and coherence, not only give promises to the public in every language delivered in their speeches, but are actually implemented specifically in education programs. Although there are several educational programs that have made promises and hopes for the future, most of them were implemented during their tenure. It should be noted that the rhetoric set in formal speeches on education was compiled by the presidential working team. In contrast to informal speeches, the more dominant is composed by the president personally so that there are still speeches that use minor and major sentences, slang diction, connotation diction, jargon diction, idioms, and elliptical cohesion which should be avoided in the use of the state speech of the president of the Republic of Indonesia

Keywords: rhetoric devices, presidential speeches, government policies, education

A. PENDAHULUAN

Pidato presiden akan baik dan diterima oleh masyarakat apabila memiliki retorika yang baik dengan menggunakan bahasa yang persuasif dan efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat Larrazabal dan Korta (di dalam Rochmawati, 2017:151) dan Noermanzah (2016:17), bahwa retorika sebagai studi kemampuan penggunaan linguistik atau bahasa bisa memberikan kontribusinya dengan bahasa yang persuasif serta meyakinkan pendengar dengan tindak tutur perlokusi yang bersifat informatif. Terlebih pidato presiden sebagai media elektronik massal yang menggunakan bahasa publik dengan efek retorika yang disusun secara persuasif, memiliki kekuatan khusus untuk menarik perhatian seluruh masyarakat karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum (Lakoff, 2001:310).

Ilmu retorika ini sudah dipelajari sejak abad kelima sebelum Masehi oleh kaum Sofis di Yunani yang awalnya retorika sebagai seni berbicara atau berpidato di depan publik yang dilakukan oleh pemerintah dan sekarang berkembang juga dalam seni menulis. Kaum Sofis berpandangan bahwa, pemerintah dipilih berdasarkan suara terbanyak atau demokrasi sehingga diperlukan adanya usaha membujuk rakyat demi kemenangan dalam pemilihan pimpinan pemerintahan (Effendy, 2015:53). Untuk itu, berkembanglah seni berpidato yang terkadang membenarkan dengan cara memutarbalikkan kenyataan demi tercapainya tujuan.

Penggunaan perangkat retorika, mulai dari pemilihan kata dan penyusunan gramatikal kalimat serta tepatnya bahasa tubuh dengan perkataan dalam berpidato mampu memengaruhi perhatian rakyat dan akhirnya terbujuk untuk memilihnya. Selain itu, setelah menjadi pemimpin pemerintahan dalam setiap pidatonya akan mampu menjadikan isi dari pidatonya tersebut sebagai ideologi yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai presiden di era reformasi, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sering disebut SBY dan Joko Widodo yang sering disebut Jokowi memiliki karakteristik dalam beretorika khususnya dalam berpidato. Dari hasil pengamatan terhadap beberapa pidato kenegaraan di bidang pendidikan, Presiden SBY dalam menggunakan retorika bahasa, secara umum benar-benar menggunakan bahasa Indonesia lisan yang cukup baku karena tidak terlihat dari daerah mana cara berbicaranya, sedangkan Presiden Jokowi ketika berpidato masih menggunakan bahasa Indonesia yang kurang baku karena masih terlihat kedaerahannya yaitu menggunakan dialek Jawa.

Livia & Soenarto (2015:69-78), menjelaskan bahwa SBY dalam beretorika terlihat rapi pada penyusunan teks pidato khususnya pidato dalam menanggapi isu ISIS yang dilihat dari keterkaitan antar kalimat yang ada. Pembawaan pidato yang tenang dan kalem menunjukkan bahwa SBY memang percaya diri dalam membawakan pidato tersebut yang juga didukung dengan gerakan tangan *steeping*

selama melakukan pidato. Hal ini menunjukkan SBY memiliki kemampuan ber retorika yang perlu dianalisis secara lebih lanjut, khususnya perangkat retorika secara menyeluruh dalam pidato kenegaraannya.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Humaidi (2016:125-126) menjelaskan bahwa karakteristik yang menarik dari Presiden SBY dalam ber retorika yaitu pada struktur teks pidato, pada struktur makro, Presiden SBY sangat piawai dalam menyajikan topik tentang perubahan demokrasi yang terjadi di Indonesia yang semakin dipercaya dan diterima oleh masyarakat. Pada struktur mikro, Presiden SBY berusaha memilih beberapa kosakata positif dalam tindakannya dan menggunakan kosakata negatif dalam menjelaskan kelompok di luar pemerintahan, serta menggunakan pola kalimat aktif dalam untuk menonjolkan pemerintah dengan melakukan beberapa tindakan perubahan.

Begitupun presiden RI, yaitu Presiden Jokowi memiliki karakteristik yang menarik dalam retorika berpidato pada setiap pidato kenegaraannya. Hasil penelitian yang dilakukan Asmara (2016:379) menunjukkan bahwa Presiden Jokowi memiliki karakteristik dalam menggunakan perangkat retorika khususnya dalam penggunaan strategi kebahasaan, yaitu strategi leksikon, stilistika, pronomina, dan sintaksis. Dalam menggunakan strategi leksikon dan stilistika, Presiden Jokowi menggunakan kosakata yang bervisi kelautan dan kerja sehingga membedakannya

dengan presiden sebelumnya dan mencitrakan diri sebagai penjelmaan Presiden Soekarno. Sedangkan dalam menggunakan strategi pronomina, Jokowi berusaha mengacaukan struktur dan mengaburkan makna pronomina: saya, kami, kita, dan rakyat sehingga membangkitkan rasa persatuan.

Kemudian, pada strategi sintaksis digunakan kalimat positif dan negatif untuk menokohkan diri (glorifikasi). Hal ini dapat ditunjukkan dengan penggunaan klausa persuasifnya, bahwa Jokowi berusaha membentuk keyakinan subjektif khalayak, mengumpulkan setiap dukungan, memanipulasi opini publik, mengkonstruksi kesadaran politik publik atau legitimasi kekuatan politik, dan untuk menghindari konfrontasi dengan presiden sebelumnya yaitu SBY.

Presiden Jokowi dalam pidato debat calon presiden juga piawai dalam menggunakan diksi yang berjenis kata asing, serapan, khusus, umum, populer, abstrak, konkret, ilmiah, konotasi, dan jargon (Setiana dkk., 2015:1). Dengan menggunakan variasi diksi tersebut menunjukkan Jokowi berusaha untuk mempersuasi masyarakat pendengar agar tidak menimbulkan kebosanan saat mendengarkan pidato debatnya. Selanjutnya, menurut Malikha (2017:121), dalam hal pemakaian kalimat, Jokowi sebagian besar mendayagunakan kalimat deklaratif, kalimat imperatif, dan kalimat interogatif dalam teks pidato tahun 2015. Penggunaan kalimat deklaratif lebih mendominasi dalam setiap pidatonya dan pidato yang digunakan mengandung makna bahwa pidato

presiden berperan sebagai pemberi informasi, sementara itu, masyarakat Indonesia sebagai penerima informasi.

Merrita (2012:iii) menjelaskan pidato Jokowi khususnya pidato kampanye Pilkada DKI 2012, terdapat empat puluh lima proposisi makro, sejumlah nilai ideologis kepemimpinan Jokowi, seperti antidiskriminasi etnis, kerakyatan, kesediaan untuk terjun ke lapangan, kooperatif, kekonsistenan, dan kecenderungan untuk menghindari konflik kekerasan. Penelitian relevan ini lebih fokus memaknai ideologi kepemimpinan Jokowi dalam pidato kampanye dilihat dari penggunaan perangkat retorika yaitu proposisi dalam setiap kalimat yang ada dalam pidato kampanye. Hal ini berbeda pada hasil penelitian ini, lebih fokus menganalisis perangkat retorika dari aspek penggunaan kalimat, diksi, kohesi, dan koherensinya.

Kemudian, kajian terhadap perangkat retorika pada pidato presiden RI juga sudah dilakukan oleh Noermanzah (2018:435) hanya saja penelitiannya menggunakan analisis wacana kritis model Norman Fairclough sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis model Van Dijk. Dari beberapa hasil penelitian relevan berkaitan dengan karakteristik retorika pidato SBY dan Jokowi, perlu dilakukan penelitian pada aspek-aspek retorika yang belum diteliti, mulai dari aspek perangkat retorika khususnya pidato kenegaraan pada bidang pendidikan. Difokuskan pada bidang pendidikan, dikarenakan pendidikan adalah unsur utama dalam pembangunan suatu bangsa

dan permasalahan pendidikan masih menjadi permasalahan bangsa Indonesia yang belum terselesaikan. Selain itu, peneliti sebagai abdi negara yang berprofesi dalam bidang pendidikan sehingga dapat memberikan pemahaman tersendiri dalam mengkajinya sehingga bermanfaat secara langsung dalam pengembangan profesionalisme sebagai tenaga pendidik terutama dalam mengajar materi wacana pidato.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis (AWK) model Van Dijk. Data utama dalam penelitian ini adalah perangkat retorika dalam pidato kenegaraan Presiden SBY dan Jokowi khususnya dalam bidang pendidikan. Kemudian, sumber data utama dalam penelitian ini difokuskan pada pidato kenegaraan yang memiliki unsur kebijakan di bidang pendidikan sehingga diperoleh sumber data yaitu 6 pidato Presiden SBY tahun 2013-2014 dan 6 pidato Presiden Jokowi tahun 2015-2016.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, wawancara, dan catat. Teknik dokumentasi sebagai teknik utama berupa pengambilan dokumentasi video pidato Presiden SBY dan Jokowi yang diperoleh dari bagian Pengarsipan dan Biro Pers, Media, dan Informasi Kementerian Sekretariat Negara RI, TVRI Nasional Pusat Jakarta, dan pada laman <https://www.youtube.com>.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menghubungkan unsur

mikro, meso, dan makro pada tiga kerangka dimensi yaitu: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Kemudian, untuk menjamin keabsahan data maka dilakukan teknik pengujian melalui cara: kredibilitas dengan triangulasi sumber data validitas pakar wacana, transferabilitas dengan penyajian yang sistematis dan objektif, dependabilitas dengan menyusun seluruh proses penelitian berdasarkan data, dan konfirmabilitas dengan mendokumentasikan seluruh data penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Temuan perangkat retorika dalam pidato kenegaraan Presiden SBY dan Jokowi khususnya dalam bidang pendidikan terbagi menjadi empat perangkat retorika, yaitu kalimat, pilihan kata atau diksi, kohesi, dan koherensi. Perangkat retorika yang terdapat dalam pidato kenegaraan presiden SBY dan Jokowi, dapat dijelaskan dalam subbab khusus berikut.

a) Kalimat dalam Pidato Kenegaraan

Kalimat yang digunakan dalam pidato kenegaraan presiden RI khususnya Presiden SBY dan Jokowi cukup bervariasi, mulai dari kalimat minor, kalimat mayor, kalimat melepas, kalimat berimbang, dan kalimat berklimaks. Sebagian besar menggunakan kalimat melepas dan beberapa kalimat berimbang dan sedikit menggunakan kalimat minor dan berklimaks. Kemudian, berdasarkan struktur pidato, pada bagian pendahuluan menggunakan kalimat mayor, minor, melepas, dan

berimbang. Pada bagian batang tubuh atau isi lebih banyak menggunakan kalimat melepas dan sesekali diapit oleh kalimat berimbang dan sedikit sekali ditemukan kalimat berklimaks.

Kemudian, pada bagian penutup sebagian besar menggunakan kalimat melepas dan sesekali diapit kalimat minor, mayor, dan berimbang. Ciri khas penggunaan kalimat oleh Presiden SBY dalam pidato kenegaraan khususnya dalam bidang pendidikan, pada pidato resmi yaitu: 1) pada bagian pendahuluan menggunakan pola kalimat: (a) mayor, melepas, berimbang, berklimaks; dan (b) mayor, melepas, berimbang. 2) Pada bagian batang tubuh menggunakan pola kalimat: (a) melepas, berimbang, berklimaks; dan (b) mayor, melepas, berimbang. Kemudian, 3) pada bagian penutup menggunakan pola kalimat melepas, berimbang, minor; dan (b) kalimat melepas. Sedangkan, penggunaan kalimat dalam pidato tidak resmi atau nonformal menggunakan pola: 1) pada bagian pendahuluan menggunakan pola kalimat: (a) mayor, melepas; dan (b) mayor, melepas, berimbang, berklimaks. 2) pada bagian batang tubuh atau isi menggunakan pola kalimat: (a) melepas, berimbang, berklimaks, minor, mayor; (b) melepas, berimbang, berklimaks; dan (c) melepas, berimbang. Kemudian, 3) pada bagian penutup menggunakan pola kalimat: (a) melepas, mayor, minor; (b) melepas, berimbang; dan (c) berimbang, mayor.

Selanjutnya, pada penggunaan kalimat oleh Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan khususnya dalam bidang pendidikan, pada pidato resmi

yaitu: 1) pada bagian pendahuluan menggunakan pola kalimat: (a) mayor, melepas, dan berimbang. 2) Pada bagian batang tubuh atau isi menggunakan pola kalimat: melepas, berimbang, dan berklimaks.

Kemudian, 3) pada bagian penutup menggunakan pola kalimat: (a) berklimaks, melepas, berimbang; dan (b) melepas, berimbang, minor. Penggunaan kalimat dalam pidato tidak resmi atau nonformal menggunakan pola: 1) pada bagian pendahuluan menggunakan pola kalimat: mayor dan melepas. 2) Pada bagian batang tubuh atau isi menggunakan pola kalimat: (a) melepas, berimbang; (b) melepas, berimbang, mayor; dan (c) melepas, berimbang, berklimaks. Kemudian, 3) pada bagian penutup menggunakan pola kalimat: (a) melepas; (b) melepas, berimbang; dan (c) melepas dan minor.

b) Pilihan Kata atau Diksi dalam Pidato Kenegaraan

Diksi yang digunakan dalam pidato kenegaraan presiden RI khususnya Presiden SBY dan Jokowi cukup bervariasi, yaitu: denotasi, denotasi, populer, baku, ilmiah, disisipi bahasa asing, konkret, slang, abstrak, istilah asing dan daerah, khusus, umum, artifal, konotasi, idiom, jargon. Untuk konteks pidato yang resmi lebih dominan digunakan diksi populer, ilmiah dengan bahasa Indonesia baku atau resmi pada bagian pendahuluan, batang tubuh, dan penutup.

Kemudian, konteks pidato yang kurang resmi lebih dominan digunakan diksi populer dan slang atau bahasa sehari-hari pada bagian

pendahuluan, batang tubuh, dan penutup. Kemudian, untuk bagian pendahuluan diawali dengan diksi populer istilah Arab, Hindu, dan Budha sebagai salam pembuka, dan diksi artifal. Pada bagian penutup juga diakhiri dengan diksi populer istilah Arab, Hindu, Budha, dan diksi artifisial yang disusun secara seni.

c) Kohesi dalam Pidato Kenegaraan

Kohesi yang digunakan dalam pidato kenegaraan presiden RI khususnya Presiden SBY dan Jokowi bervariasi, yaitu *anafora klasik, repetisi, substitusi, elipsis, superordinat, sinonimi, antonimi, eksofora, endofora, kolokasi, intonasi naik dan turun, konjungsi penegas/konsekuensi, konjungsi syarat, konjungsi cara, konjungsi pertentangan, konjungsi petunjuk, konjungsi aditif, konjungsi pembenaran, konjungsi perbandingan, konjungsi pemiripan, konjungsi sebab, konjungsi akibat, konjungsi pilihan, konjungsi urutan/penambahan, konjungsi pengandaian, konjungsi waktu, konjungsi korelatif, konjungsi pengulangan, dan konjungsi tak bersyarat.*

Pada bagian pendahuluan lebih dominan menggunakan *kohesi sinonimi, anafora klasik, dan repetisi.* Pada bagian batang tubuh lebih dominan menggunakan *kohesi klasik, repetisi, substitusi, konjungsi sebab, konjungsi akibat, konjungsi waktu, konjungsi cara, konjungsi syarat, konjungsi tujuan, konjungsi kondisional, konjungsi urutan, dan konjungsi pertentangan.* Kemudian, pada bagian penutup lebih dominan

menggunakan konjungsi penegas akhirnya, dengan demikian, dan demikianlah.

d) Koherensi dalam Pidato Kenegaraan

Koherensi yang digunakan dalam pidato kenegaraan presiden RI khususnya Presiden SBY dan Jokowi cukup bervariasi, yaitu *koherensi penegas, syarat, pertentangan, setara, kelanjutan, pembenaran, perbandingan, persamaan, pemiripan, akibat, sebab, timbal balik, hubungan tujuan, cara, pilihan, persetujuan, menguatkan keadaan, pertanyaan lanjutan, instruksi, pengandaian, waktu, penjelas, objek, penolakan, intensitas, kondisional, pemakluman, pengulangan, konsesif, dan tak bersyarat*. Pada bagian pendahuluan menggunakan *koherensi hubungan kesamaan makna salam pembuka doa dan penghormatan, hubungan tujuan, hubungan waktu, hubungan sebab, hubungan akibat, hubungan cara, hubungan kondisional, hubungan syarat, hubungan setara, hubungan pertentangan, hubungan perbandingan, hubungan pemiripan, hubungan penjelas, dan hubungan kelanjutan*.

Pada bagian batang tubuh atau isi digunakan bervariasi *koherensi, yaitu hubungan waktu, hubungan tujuan, hubungan cara, hubungan kondisional, hubungan perbandingan, hubungan persamaan, hubungan pembenaran, hubungan pertentangan, hubungan penjelas, hubungan syarat, hubungan menguatkan pernyataan/keadaan sebelumnya, hubungan penegas, hubungan setara, hubungan jumlah/intensitas, hubungan pemiripan,*

hubungan timbal-balik, hubungan menyatakatan akibat, hubungan sebab, hubungan penambahan/kelanjutan, hubungan urutan, hubungan pemakluman/tanpa syarat, hubungan pengulangan, hubungan penyangkalan/ penolakan, hubungan pilihan, hubungan penunjuk, hubungan pengandaian, dan hubungan konsesif/ menyatakan kesediaan yang berbeda dengan yang dinyatakan dengan kalimat sebelumnya, hubungan pembatasan, hubungan sasaran, hubungan persetujuan, hubungan pertanyaan lanjutan, hubungan intruksi/ permintaan/ permohonan/ perintah, hubungan jawaban, hubungan keterangan tempat, hubungan keterangan diri, hubungan perubahan, hubungan penghargaan, dan hubungan mempersilakan.

Kemudian, pada bagian penutup menggunakan *koherensi hubungan menegaskan, hubungan tujuan, hubungan cara, hubungan sebab, hubungan sebab, hubungan syarat, hubungan pertentangan, hubungan perbandingan, hubungan pilihan, hubungan penjelas, hubungan kondisional, hubungan urutan, hubungan penghargaan, doa, hubungan amanat, hubungan waktu, hubungan pertanyaan kelanjutan, hubungan penunjuk, hubungan setara, hubungan intensitas, hubungan cara, dan hubungan salam penutup.*

2. Pembahasan

Perangkat retorika berupa kalimat, diksi, kohesi, dan koherensi yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia khususnya Presiden SBY dan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya

menunjukkan seberapa mahirnya mereka dalam mengolah bahasa di depan umum secara ekspresif (Muji & Kusmana, 2019:3). Perlu diketahui bahwa dalam menyusun pidato kenegaraan terbagi menjadi dua jenis, yaitu penyusunan pidato resmi dan pidato tidak resmi. Penyusunan untuk kedua jenis pidato ini sama, yaitu disusun dengan tahap inventio (penemuan) bersama tim penyusun pidato kenegaraan, dispositio (penyusunan), elocutio (gaya), memoria (memori), dan pronuntiatio (penyampaian) (Rakhmat, 2019:6-8) Dalam hal ini, yang membedakannya adalah cara pronuntiatio (penyampaian), apabila pidato resmi disampaikan secara manuskrip dengan diksi populer dan ilmiah, sedangkan pidato tidak resmi disampaikan secara memoriter (mengingat kata demi kata) dan ekstempore (persiapan garis besar topik saja atau out line) dengan menggunakan diksi populer dan slang atau bahasa sehari-hari.

Khusus untuk Presiden SBY memiliki keunikan dalam hal pronuntiatio (penyampaian), yaitu untuk pidato resmi maupun tidak resmi lebih dominan menyampaikan pidatonya secara memoriter dan ekstemporer yang mengandalkan ingatan dan pengalaman. Sedangkan Presiden Jokowi lebih banyak mengandalkan teks atau manuskrip ketika menyampaikan pidatonya, terutama pada konteks pidato resmi. Selain itu, keunikan yang dimiliki oleh Presiden SBY yaitu jumlah kata yang digunakan dalam setiap pidatonya mencapai rata-rata 5400 sedangkan Presiden Jokowi jumlahnya hanya 3800 kata. Hal ini menunjukkan

bahwa Presiden SBY lebih memiliki retorika yang panjang dibandingkan Presiden Jokowi.

Presiden SBY dan Jokowi dalam menggunakan perangkat retorika, baik dalam bentuk kalimat, diksi, kohesi, dan koherensi bukan hanya memberikan janji saja pada masyarakat dalam setiap bahasa yang disampaikan dalam pidatonya, tetapi benar-benar dilaksanakan khususnya pada program pendidikan. Walaupun ada beberapa program pendidikan yang menjadi janji dan harapan di masa yang akan datang, tetapi sebagian besar dilaksanakan dalam masa kerjanya.

Program pendidikan Presiden SBY yang sesuai dengan yang disampaikan melalui perangkat retorika dalam pidatonya yaitu peningkatan program pendidikan Lemhannas, berkeliling Indonesia bertemu guru, peningkatan kesejahteraan guru, program Bidikmisi, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa bagi yang berprestasi, beasiswa bagi golongan tidak mampu, beasiswa reguler, Beasiswa Presiden (Indonesia Presidential Scholarship), peresmian perguruan tinggi negeri, beasiswa untuk S-2 dan S-3 di dalam maupun di luar negeri, program keikutsertaan dalam olimpiade internasional, program afirmasi yaitu lulusan-lulusan sekolah menengah yang tinggal di wilayah timur Indonesia, seperti Papua dan Papua Barat dan daerah perbatasan, mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi terbaik di Indonesia, program Gerakan Nasional Rehabilitasi Gedung Sekolah, program Pendidikan

Menengah Universal, program wajib belajar 12 tahun, anggaran pendidikan meningkat 6 kali lipat dari Rp62,7 triliun menjadi Rp375,4 triliun, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan tahun 2014 anggaran pendidikan telah mencapai Rp375,4 triliun dan tahun 2015 mendatang direncanakan sebesar Rp404 triliun, dan alokasi anggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp67,2 triliun.

Jenis kalimat yang digunakan oleh Presiden SBY dalam pidato kenegaraannya lebih dominan menggunakan kalimat melepas dan berimbang dibandingkan menggunakan kalimat mayor, minor dan berklmaks dalam menyampaikan program pendidikannya sehingga memberikan informasi yang sistematis. Hal ini dikarenakan kalimat melepas memberikan informasi dimulai dari induk kalimat atau informasi utama dan diikuti anak kalimat atau informasi tambahan sedangkan kalimat berimbang menyajikan struktur yang memperlihatkan kesejajaran bentuk dan informasinya dituangkan ke dalam bangun kalimat yang simetris yang memiliki sebab akibat yang sama pentingnya. Berikut contoh kalimat melepas yang mengandung unsur informatif dalam pidato kenegaraan Presiden SBY.

Saya sungguh memberikan atensi yang tinggi kepada guru. Saya masih ingat satu bulan setelah saya menjadi presiden, saya cek gaji guru dan PNS golongan I/a itu 600 ribu. Saya mengumpulkan anggota kabinet, menteri-menteri terkait, salah satu saksinya adalah Pak Sudi Silalahi, nampaknya 600 ribu dikaitkan dengan tugas, tanggung jawab dan

pengorbanannya terlalu kecil. Oleh karena itulah kami bertekad dulu, sejalan dengan kemampuan negara dan pertumbuhan perekonomian kita, minimal gaji guru haruslah mencapai Rp. 2,5 juta. Itu awal. (PRSBY-132)

Dari kutipan pidato Presiden SBY di atas, dapat kita lihat dalam paragraf tersebut hampir seluruhnya menggunakan kalimat melepas dan hanya satu yang menggunakan kalimat mayor yaitu "Itu awal". Kalimat melepas yang disusun tersebut misalnya satu contoh kalimat: "Saya mengumpulkan anggota kabinet, menteri-menteri terkait, salah satu saksinya adalah Pak Sudi Silalahi, nampaknya 600 ribu dikaitkan dengan tugas, tanggung jawab dan pengorbanannya terlalu kecil." Dari kalimat ini menunjukkan terdapat induk kalimat yaitu "Saya mengumpulkan anggota kabinet, menteri-menteri terkait, salah satu saksinya adalah Pak Sudi Silalahi," dan anak kalimat kalimatnya "nampaknya 600 ribu dikaitkan dengan tugas, tanggung jawab dan pengorbanannya terlalu kecil".

Pola kalimat melepas yang disusun memberikan informasi yang cukup jelas dan tidak bertele-tele dan membuat pendengar terutama guru menjadi penasaran karena maksud dan tujuan kalimat tersebut akan dijawab langsung pada kalimat berikutnya. Kalimat jawabannya pun dalam kalimat melepas yaitu: "Oleh karena itulah kami bertekad dulu, sejalan dengan kemampuan negara dan pertumbuhan perekonomian kita, minimal gaji guru haruslah mencapai Rp. 2,5 juta." Kalimat melepas tersebut, benar-

benar dilakukan oleh pemerintahan SBY bahwa gaji guru khususnya yang PNS dari tahun ke tahun mengalami kenaikan misalnya saja di tahun 2013 untuk THP guru dalam pangkat terendah golongan II/a tidak kawin memiliki penghasilan sebesar Rp3.049.500,00 per bulan belum lagi ditambah dengan tunjangan sertifikasi yang nilainya sebesar gaji pokok. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden SBY pada pemerintahannya sangat memperhatikan aspirasi guru yang tingkat kesejahteraannya sangat kurang di zaman orde lama dan orde baru.

Kemudian, saat menyampaikan program pendidikan dalam pidato kenegaraan, Presiden SBY dan Jokowi menggunakan *kohesi anafora klasik, repetisi, substitusi, elipsis, superordinat, sinonimi, antonimi, eksofora, endofora, kolokasi, intonasi naik dan turun, konjungsi penegas/konsekuensi, konjungsi syarat, konjungsi cara, konjungsi pertentangan, konjungsi petunjuk, konjungsi aditif, konjungsi pembenaran, konjungsi perbandingan, konjungsi pemiripan, konjungsi sebab, konjungsi akibat, konjungsi pilihan, konjungsi urutan/penambahan, konjungsi pengandaian, konjungsi waktu, konjungsi korelatif, konjungsi pengulangan, dan konjungsi tak bersyarat*. Pada bagian pendahuluan lebih dominan menggunakan *kohesi sinonimi, anafora klasik, dan repetisi*.

Pada bagian batang tubuh lebih dominan menggunakan *kohesi klasik, repetisi, substitusi, konjungsi sebab, konjungsi akibat, konjungsi waktu, konjungsi cara, konjungsi syarat, konjungsi tujuan, konjungsi*

kondisional, konjungsi urutan, dan konjungsi pertentangan.

Kemudian, pada bagian penutup lebih dominan menggunakan *konjungsi penegas* akhirnya, dengan demikian, demikianlah. Dari variasi perangkat kohesi tersebut Presiden SBY benar-benar meyakinkan pendengar sehingga masyarakat yakin dengan apa yang disampaikan melalui pidato kenegaraannya terutama tentang program-program pendidikan (Noermanzah dkk., 2017: 221-222).

Kemudian, koherensi yang digunakan dalam pidato kenegaraan presiden Presiden SBY dan Jokowi khususnya dalam pidato dalam bidang pendidikan cukup bervariasi, yaitu *koherensi penegas, syarat, pertentangan, setara, kelanjutan/penambahan, pembenaran, perbandingan, persamaan, pemiripan, akibat, sebab, timbal balik, hubungan tujuan, cara, pilihan, persetujuan, menguatkan keadaan, pertanyaan lanjutan, instruksi, pengandaian, waktu, penjelas, objek, penolakan, intensitas, kondisional, pemakluman, pengulangan, konsesif, dan tak bersyarat*. Pada bagian pendahuluan menggunakan *koherensi hubungan kesamaan makna salam pembuka doa dan penghormatan, hubungan tujuan, hubungan waktu, hubungan sebab, hubungan akibat, hubungan cara, hubungan kondisional, hubungan syarat, hubungan setara, hubungan pertentangan, hubungan perbandingan, hubungan pemiripan, hubungan penjelas, dan hubungan kelanjutan*.

Pada bagian batang tubuh atau isi digunakan bervariasi koherensi, yaitu *hubungan waktu, hubungan*

tujuan, hubungan cara, hubungan kondisional, hubungan perbandingan, hubungan persamaan, hubungan pembenaran, hubungan pertentangan, hubungan penjelas, hubungan syarat, hubungan menguatkan pernyataan/ keadaan sebelumnya, hubungan penegas, hubungan setara, hubungan jumlah/intensitas, hubungan pemiripan, hubungan timbal-balik, hubungan menyatakatan akibat, hubungan sebab, hubungan penambahan/kelanjutan, hubungan urutan, hubungan pemakluman/ tanpa syarat, hubungan pengulangan, hubungan penyangkalan/ penolakan, hubungan pilihan, hubungan penunjuk, hubungan pengandaian, dan hubungan konsesif/ menyatakan kesediaan yang berbeda dengan yang dinyatakan dengan kalimat sebelumnya, hubungan pembatasan, hubungan sasaran, hubungan persetujuan, hubungan pertanyaan lanjutan, hubungan intruksi/ permintaan/ permohonan/ perintah, hubungan jawaban, hubungan keterangan tempat, hubungan keterangan diri, hubungan perubahan, hubungan penghargaan, dan hubungan mempersilakan.

Selanjutnya, pada bagian penutup menggunakan koherensi *hubungan menegaskan/kesimpulan, hubungan tujuan, hubungan cara, hubungan sebab, hubungan sebab, hubungan syarat, hubungan pertentangan, hubungan perbandingan, hubungan pilihan, hubungan penjelas, hubungan kondisional, hubungan urutan, hubungan penghargaan, doa, hubungan amanat, hubungan waktu, hubungan pertanyaan kelanjutan,*

hubungan penunjuk, hubungan setara, hubungan intensitas/jumlah, hubungan cara, dan hubungan salam penutup. Berbagai jenis penggunaan koherensi ini menunjukkan bahwa Presiden SBY dan Jokowi piawai dalam mengolah bahasa dan tentunya menghindari kejenuhan dari pendengar.

Kohesi yang lebih dominan digunakan oleh Presiden SBY dan Jokowi adalah kohesi anafora, repetisi, substitusi, dan kohesi sebab akibat dan sebaliknya, serta kohesi waktu. Kohesi anafora karena kohesi ini merujuk silang pada unsur yang disebutkan terdahulu sehingga pendengar terbantu untuk memahami setiap gagasan yang didengarnya dan tidak mengalami kejenuhan saat mendengarkan pidato kenegaraan. Kohesi repetisi juga mengulang kata yang sama meujuk pada kalimat sebelumnya. Substitusi merupakan anafora yang mengacu pada anteseden namun pronomina referensial atau kata-kata yang digunakan untuk mengganti anteseden itu tidak sesuai dengan anafora klasik atau bahkan tidak sama dengan kata-kata yang tertera pada antesedennya. Kohesi sebab akibat menjelaskan sebab hadirnya suatu program dan dijelaskan dampaknya dalam bentuk akibat dan sebaliknya. Kemudian, kohesi waktu lebih banyak menjelaskan waktu program pendidikan yang dilaksanakan dan membandingkan dengan program pendidikan di masa lalu sehingga pendengar benar-benar memahami gagasan yang disampaikan. Misalnya bisa kita lihat pada contoh kutipan pidato berikut.

Saya dapat katakan bahwa pemandangan yang paling indah di

Indonesia bukan hanya gunung tinggi, hutan yang lebat dan laut biru. Pemandangan yang paling indah adalah anak-anak kita yang setiap pagi berjalan ke sekolah dengan seragam yang bersih dan penuh ceria. Kita semua mempunyai kewajiban agar mereka dapat belajar dalam sarana sekolah yang nyaman, bersih dan sehat. Karena itulah, kita terus membangun sekolah baru dan ruang kelas baru, serta merehabilitasi ruang kelas yang sudah rusak. Sejak tahun 2010, melalui program Gerakan Nasional Rehabilitasi Gedung Sekolah telah diperbaiki hampir 300.000 ruang kelas di seluruh Indonesia. (PRSBY-157).

Dari kutipan di atas, kalimat kedua dan selanjutnya merupakan kalimat yang mengacu pada kalimat pertama sehingga bisa dikatakan menggunakan anafora klasik. Kemudian, penggunaan kata kita, sekolah, ruang kelas menunjukkan dalam beberapa kalimat menggunakan repetisi. Penggantian persona saya menjadi kita merupakan substitusi persona. Penggunaan kata karena itulah menunjukkan kohesi akibat yang mana kalimat sebelumnya merupakan sebab. Kemudian, penggunaan kata sejak di awal kalimat ke lima menunjukkan bahwa kalimat tersebut menggunakan kohesi waktu. Dengan hadirnya variasi kohesi tersebut maka secara otomatis kalimat tersebut pun akan koheren.

Koherensi ditandai dengan hubungan penjelas: *bahwa* dan *adalah*, hubungan tujuan: *agar*, hubungan yang menyatakan akibat: *karena itulah*, hubungan waktu: *sejak*, dan hubungan cara yaitu *melalui*. Dengan menggunakan variasi kohesi dan koherensi tersebut menjadikan paragraf tentang program Gerakan

Nasional Rehabilitasi Sekolah tersebut mudah dipahami oleh pendengar. Selain itu, program pendidikan tersebut pada kenyataan di masyarakat memang sudah benar-benar dilaksanakan. Walaupun masih banyak sekolah yang statusnya rusak berat, tetapi semuanya adalah proses yang lambat laun akan teratasi bila dilaksanakan secara bertahap dan sesuai regulasinya.

Selanjutnya, khusus untuk Presiden Jokowi tidak begitu banyak berbicara mengenai program pendidikan. Beberapa program pendidikan yang disampaikan, yaitu Kampus IPDN yang representatif, penghargaan kepada kepala sekolah berintegritas dalam penyelenggaraan Ujian Nasional, konsep *green school*, hasil penelitian dosen yang harus diimplementasikan dalam masyarakat, Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia, sistem pendidikan vokasional, Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak usia sekolah 6-21 tahun, regulasi yang cepat, revolusi karakter mental dalam keberagaman, penyempurnaan bantuan biaya pendidikan dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima. Tidak begitu banyak program pendidikan yang disampaikan dalam pidato Presiden Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi tidak menonjolkan program pendidikan, yang diutamakan lebih pada penjelasan berupa arahan tentang bagaimana cara melakukan perubahan karakter dan lebih memprioritaskan pendidikan pada masyarakat kurang mampu dari segi ekonomi dan akses pendidikan di

daerah 3-T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Karakteristik penggunaan kohesi dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi yaitu menggunakan kohesi anafora klasik, repetisi, substitusi, kohesi syarat: kalau, konjungsi sebab: oleh karena itu, konjungsi tujuan: untuk, konjungsi penegas: untuk itu, konjungsi waktu: selama ini, dan konjungsi pertentangan: padahal. Sedangkan jenis kalimatnya didominasi penggunaan kalimat melepas dan disisipi kalimat berimbang. Kalimat melepas dan berimbang yang digunakan dapat juga disebut kalimat deklaratif yang tujuannya sama-sama menyampaikan informasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Malikha (2017:129) bahwa dalam hal pemakaian kalimat, Jokowi sebagian besar mendayagunakan kalimat deklaratif dalam teks pidato. Penggunaan kalimat deklaratif lebih mendominasi dalam setiap pidatonya dan pidato yang digunakan mengandung makna bahwa pidato presiden berperan sebagai pemberi informasi, sementara itu masyarakat Indonesia sebagai penerima informasi.

Dengan penggunaan kalimat melepas dan berimbang serta beberapa jenis kohesi oleh Presiden Jokowi mampu menjelaskan program pendidikan dengan singkat dan padat dengan bahasa yang populer dan bahasa sehari-hari atau slang khususnya pada pidato tidak resminya. Berikut salah satu contoh penggunaan kohesi dan kalimat dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi.

Inilah keberagaman yang harus disampaikan kepada anak didik kita

bahwa kita semua ini adalah saudara, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang saya minta kepada Bapak/Ibu guru selalu sampaikan hal-hal ini kepada anak didik kita agar kita semuanya bisa satu, bisa rukun di antara saudara-saudara kita. Kita memang berbeda-beda, beda kulit, beda rambut, beda mata. Semuanya memang beda. Karena hanya kepada Bapak/Ibu gurulah saya ingin menyampaikan ini agar anak didik kita, bangsa ini ke depan tetap satu NKRI ini dalam keadaan dan situasi apapun. Karena yang menjadikan seseorang itu menjadi jenderal, yang menjadikan seseorang itu menjadi menteri, dan saya sendiri bisa berdiri di sini menjadi Presiden juga karena Bapak dan Ibu guru. (PRJW-167)

Dari kutipan pidato Presiden Jokowi memberikan penjelasan bahwa beberapa kohesi yang digunakan yaitu, 1) kohesi anafora klasik yang ditandai dengan pengacuan relasi bentuk kalimat kedua yang mengacu kepada kalimat pertama, kalimat ketiga mengacu kepada kalimat kedua dan seterusnya dengan pola pengacuan kalimat kepada kalimat yang telah disebutkan sebelumnya; 2) penggunaan kohesi repetisi yang ditandai dengan pengulangan kata yang sama yang mengacu pada kalimat sebelumnya, misalnya pengulangan kata inilah, anak didik, saya, kita, NKRI, beda, Bapak/Ibu guru; 3) kohesi substitusi yang ditandai dengan pengantian kata persona saya menjadi kita atau sebaliknya, kita menjadi semuanya; 4) konjungsi sebab sekaligus akibat ditandai dengan penggunaan kata hubung karena. Kemudian, kalimat yang digunakan juga lebih banyak jenis kalimat melepas misalnya pada kalimat awal "Inilah keberagaman

yang harus disampaikan kepada anak didik kita bahwa kita semua ini adalah saudara, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dari kalimat ini dapat kita tunjukkan bahwa terdapat induk kalimat yaitu “Inilah keberagaman yang harus disampaikan kepada anak didik kita”, kemudian dilanjutkan dengan anak kalimat yaitu “bahwa kita semua ini adalah saudara, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Penggunaan kalimat melepas dan variasi kohesi yang digunakan Presiden Jokowi bertujuan agar memudahkan pendengar memahami setiap gagasan yang akan disampaikan dalam hal ini presiden ingin memotivasi guru untuk terus berjuang dalam menciptakan lulusan terbaik bangsa.

Karakteristik penggunaan koherensi dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yaitu pada bagian pendahuluan menggunakan hubungan kesamaan makna salam pembuka dan penghormatan. Salam pembuka diawali dengan doa yaitu *Bismillahirrahmanirrahim* (dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang) yang menunjukkan presiden yang religius, salam pembuka untuk umat Muslim yaitu *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*, salam pembuka untuk umat Hindu yaitu *oom swastiastu*, salam pembuka untuk umat Budha yaitu *namo buddhaya*, dan salam pembuka secara umum atau salam umat Kristiani yaitu salam sejahtera untuk kita semua.

Hal ini menunjukkan di masa reformasi yang serba dengan

kebebasan dalam berbicara, tetapi kebebasan yang memiliki aturan karena Indonesia begitu beragam agamanya sehingga menghindari konflik dan semakin mempersuasi pendengar sebagai anggota dari kegiatan pidato kenegaraan (Putra, 2017 dan Noermanzah dkk., 2018:119-120). Pada bagian batang tubuh koherensi yang digunakan sangat bervariasi, tetapi yang lebih dominan untuk menjelaskan program pendidikan digunakan koherensi sebab, akibat, syarat, cara, tujuan, waktu, penegas atau kesimpulan. Dengan koherensi tersebut, mampu menjelaskan program pendidikan secara detail dan meyakinkan pendengar.

Kemudian, pada bagian penutup yang menarik juga digunakan koherensi penegas atau kesimpulan sebagai tanda penutup pidato, ucapan terima kasih dan harapan sebagai penghargaan terhadap keberadaan pendengar dan bertujuan memengaruhi pendengar serta diakhiri dengan beberapa bentuk salam penutup doa yaitu salam penutup umum, salam penutup Hindu, salam penutup Budha, salam penutup Muslim. Sebaiknya, karena di Indonesia ini terdapat agama Kristiani dan Khonghucu maka digunakanlah salam pembuka dan penutup dari agama tersebut, terlebih kita hidup di era reformasi yang berasaskan Pancasila. Salam penutup doa ini sudah menjadi bagian yang wajib dalam menutup pidato.

Perlu diperhatikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang lebih baku secara kalimat, diksi, kohesi, dan koherensi adalah

digunakan oleh Presiden SBY dibandingkan dengan Presiden Jokowi. Hal ini ditunjukkan dengan intensitas penggunaan kata slang atau bahasa tidak baku sehari-hari dilakukan oleh Presiden Jokowi terutama dalam pidato tidak resminya lebih banyak dibandingkan dengan Presiden SBY. Untuk itu, ada baiknya kita lebih mencontoh model retorika pidato Presiden SBY dalam menggunakan perangkat retorika dan dialeknya pun tidak terlihat kedaerahannya. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan pada bagian kedua dari UU tersebut dikemukakan tentang penggunaan bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundangan, dokumen resmi negara, dan pidato resmi presiden/wakil presiden/pejabat negara yang disampaikan di dalam/di luar negeri. Lebih khusus dijelaskan dalam pasal 28 UU No. 24 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri". Dari bunyi pasal tersebut sangatlah jelas dan terperinci bahwa para pejabat negara di dalam menyampaikan pidatonya wajib menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar seorang pejabat yang bertugas sebagai tokoh publik, mampu menjadi panutan banyak orang untuk menghargai dan menjunjung tinggi bahasa nasional,

bahasa Indonesia. Selanjutnya ditentukan bahwa presiden dan wakil presiden serta pejabat negara lainnya ketika membalas pidato resmi harus menggunakan bahasa Indonesia pada saat menerima pejabat, seperti kepala negara/kepala pemerintahan, wakil kepala negara/wakil kepala pemerintahan, Sekretaris Jenderal PBB/pimpinan tertinggi organisasi internasional, yang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia.

Kemudian, penggunaan bahasa Indonesia baku juga diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 bahwa presiden dalam penyampaian pidato harus menggunakan bahasa Indonesia di dalam forum resmi yang diselenggarakan oleh PBB dan organisasi internasional dapat didampingi penerjemah atau diikuti transkrip pidato dalam bahasa Inggris untuk memperjelas makna yang akan disampaikan. Harapannya bahasa Indonesia tetap ada sebagai jati diri bangsa. Terlebih lagi apabila bahasa Indonesia sudah dikenal di tingkat internasional bisa jadi bahasa Indonesia bisa menjadi salah satu bahasa Internasional yang semakin memudahkan kita dalam berinteraksi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Tentunya jangan berharap bahwa bahasa Indonesia dihormati dan dihargai oleh bangsa lain jika tidak dihormati dan dihargai oleh bangsa sendiri. Dalam hal ini tentunya tugas pertama sebagai teladan bangsa yaitu Presiden RI dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan hanya: 1) di dalam pidato resmi, tetapi juga dalam pidato tidak resmi dan 2) bukan hanya pidato di dalam

negeri, tetapi juga pidato di luar negeri.

Dengan demikian, perangkat retorika, baik diksi, kohesi, koherensi maupun kalimat yang digunakan oleh Presiden SBY dan Presiden Jokowi di bidang pendidikan bukan hanya retorika belaka atau alat penguasa, tetapi benar-benar digunakan sebagai alat untuk menyampaikan program pendidikan yang direncanakan dan yang sudah dilaksanakan. Walaupun ada beberapa kekurangan seperti penyaluran program pendidikan yang belum merata, waktu penerimaan program pendidikan yang terkadang tidak tepat waktu, dan informasi tentang program pendidikan yang belum merata diterima masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai pendapat Alo (2012:88) dan Noermanzah (2019:1794-1795) bahwa pidato politik jenis pidato kenegaraan bertujuan menunjukkan kebijakan publik dan dimotivasi oleh keinginan untuk membujuk dan meyakinkan bangsa atau masyarakat dan membiasakan pendengar dengan kebijakan, rencana, dan tindakan sosial ekonomi. Pidato presiden juga memengaruhi masyarakat, berpikir tentang realitas sosial politik yang ada. Untuk itu, mengapa di antara berbagai pidato yang disampaikan presiden, pidato kenegaraan menempati posisi yang sangat penting.

Kemudian, kalimat, diksi, kohesi, dan koherensi yang disusun, bukan semata-mata disusun oleh presiden, tetapi khusus untuk pidato resmi di bidang pendidikan disusun oleh tim kerja kepresidenan, mulai dari Staf Ahli Presiden, Kementerian

Segneg, Sekretaris Kabinet, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristekdikti, kementerian terkait, serta para pakar atau pihak-pihak yang terkait dengan tema pendidikan. Berbeda dengan pidato tidak resmi lebih dominan disusun oleh presiden secara pribadi sehingga terlihat pidato yang disampaikan masih ada yang menggunakan kalimat minor dan mayor, diksi slang, diksi konotasi, diksi jargon, idiom, dan kohesi elipsis yang seharusnya dihindari dalam penggunaan pidato kenegaraan Republik Indonesia.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo dalam menggunakan perangkat retorika, baik dalam bentuk diksi, kohesi, koherensi, dan kalimat bukan hanya memberikan janji saja pada masyarakat dalam setiap bahasa yang disampaikan dalam pidatonya, tetapi benar-benar dilaksanakan khususnya pada program pendidikan. Walaupun ada beberapa program pendidikan yang menjadi janji dan harapan di masa yang akan datang, tetapi sebagian besar dilaksanakan dalam masa kerjanya.

Perlu diketahui bahwa diksi, kohesi, koherensi, dan kalimat yang disusun, bukan semata-mata disusun oleh presiden RI, tetapi khusus untuk pidato resmi di bidang pendidikan disusun oleh tim kerja kepresidenan, mulai dari Staf Ahli Presiden, Kementerian Segneg, Sekretaris Kabinet, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristekdikti, kementerian terkait,

serta para pakar atau pihak-pihak yang terkait dengan tema pendidikan. Berbeda dengan pidato tidak resmi lebih dominan disusun oleh presiden secara pribadi sehingga terlihat pidato yang disampaikan masih ada yang menggunakan kalimat minor dan mayor, diksi slang, diksi konotasi, diksi jargon, idiom, dan kohesi elipsis yang seharusnya dihindari dalam penggunaan pidato kenegaraan Republik Indonesia.

Dari penggunaan perangkat retorika yang variatif dan ekspresif mulai dari diksi, kohesi, koherensi, dan kalimat pada pidato kenegaraan Republik Indonesia khususnya Presiden SBY dan Presiden Jokowi di bidang pendidikan, bisa dijadikan salah satu model dalam pembelajaran pidato di tingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan tingkat perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alo, M. A. (2012). A Rhetorical Analysis of Selected Political Speeches of Prominent African Leaders. *British Journal of Arts and Social Sciences*, 10(1), 88.
- Effendy, O. U. (2015). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Humaidi, A. (2016). Struktur Teks, Kognisi Sosial, dan Dimensi Sosial Pidato Susilo Bambang Yudhoyono. *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya (JBSP)* 6(1), 125-126, <http://dx.doi.org/10.20527/jbsp.v6i1.3744>
- Lakoff, R. T. (2001). The Rhetoric of the Extraordinary Moment: the Concession and Acceptance Speeches of Al Gore and George W. Bush in the 2000 Presidential Election. *Pragmatics*, 11(3), 310.
- Livia & Soenarto. (2015). Retorika Barack Hussein Obama dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Menanggapi Isu ISIS di Dunia. *Jurnal Komunikasi, Universitas Taruma Nagara*, 7(1), 69-78. <http://dx.doi.org/10.24912/jk.v7i1.8>
- Malikha, U. (2017). Penggunaan Bahasa Presiden Jokowi dalam Teks Pidato Tahun 2015. *Jurnal NOSI*, 3(1), 121-129.
- Merrita, D. (2012). "Ideologi Kepemimpinan: Analisis Wacana Kritis Pidato Kampanye Joko Widodo dalam Pilkada DKI Jakarta". *Tesis*, Universitas Indonesia.
- Muji, & Kusmana, S. (2019). Pengembangan Bahan Ajar Pidato Berdasarkan Karakteristik Pidato serta Implikasinya dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Jurnal Tuturan*, 8(1), 3. doi:10.33603/jt.v8i1.2676
- Noermanzah, Emzir, & Lustyantje, N. (2018). President Joko Widodo's Rhetorical Technique of Arguing in the Presidential Speeches of the Reform Era. *International Journal of Applied Linguistics and English Literature*, 7(5), 119-120. doi:10.7575/aiac.ijalel.v.7n.5p.117
- Noermanzah, N., Emzir, E., & Lustyantje, N. (2017). Variety of Rhetorics in Political Speech

- President of the Republic of Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo in Educational Field. *Humanus*, 16(2), 221-222. doi:10.24036/humanus.v16i2.8103
- Noermanzah, Wardhana, D. E. C., Friantary, H., Arsyad, S. (2019). Joko Widodo's Rhetorical Structure in the Presidential Speeches for Addressing Educational Problems. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(10), 1794-1795, <http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-1019-22878>
- Noermanzah. (2016). Sermon Rhetoric Patterns of President Joko Widodo's Oration in the Occasion of Bung Karno's Oration on June 1, 1945 Commemoration. *Journal of Indonesian Language Education and Literary (JILEL)*, 1(2), 17, <http://usnsj.com/index.php/JILEL/article/view/JILEL003/pdf>.
- Noermanzah. (2018). "Rhetorical Devices in the Presidential Speeches of the President of the Republic of Indonesia in the Reformation Era". *In the 1st International Seminar on Language, Literature and Education, KnE Social Sciences*, pages 435. DOI 10.18502/kss.v3i9.2705
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya.
- Putra, N. (2017). Implikasi Kebebasan Pers Terhadap Dinamika Politik Islam di Sumatera Utara Pada Masa Reformasi Periode 1998-2011. *Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial & Keislaman*, 2(1). doi:10.31604/muaddib.v2i1.153
- Rakhmat, J. (2009). *Retorika Modern: Pendekatan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rochmawati, D. (2017). Pragmatic and Rhetorical Strategies in the English-Written Jokes. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 7(1), 151. <https://doi.org/10.17509/ijal.v7i1.6868>
- Setiana, A., Munaris, & Fuad M. (2015). Aspek Kebahasaan Jokowi pada Debat Calon Presiden dan Kegunaannya dalam Pembelajaran. *Jurnal Kata (Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya)*, 3(3), <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/BINDO1/article/view/8238>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.